

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Eksistensi dan perkembangan industri kosmetik menjadi salah satu wujud nyata keberhasilan globalisasi terhadap internasionalisasi sektor industri. Dengan *market size* mencapai US\$ 380.2 miliar (5.6 triliun rupiah) pada 2019 serta diramalkan terus tumbuh hingga US\$ 463.5 miliar (6.8 triliun rupiah) pada 2027, Industri kosmetik kini menjadi fitur yang tidak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat *modern*. Tidak dapat dipungkiri, kesadaran masyarakat *modern* akan pentingnya *external beauty* baik pada wanita maupun pria menjadi salah satu penyebab geliat pertumbuhan positif penggunaan kosmetik di pasar global (Allied Market Research, 2021).

Meskipun sempat mengalami kontraksi yang cukup mendalam pada 2020, industri kosmetik telah kembali mengalami geliat peningkatan yang signifikan pada 2022 dengan total pendapatan senilai US\$ 100.49 miliar (1.49 kuadriliun rupiah) pada pertengahan tahun yang mana hal ini menunjukkan tren positif pertumbuhan dari US\$ 80.73 miliar (1.2 kuadriliun rupiah) pada tahun 2021. Industri kosmetik bahkan diproyeksikan oleh *The Statista Consumer Market Outlook* akan terus mengalami pertumbuhan yang positif hingga mencapai US\$ 131 miliar (1.9 kuadriliun rupiah) pada 2026 (Statista, 2022).

Kendati demikian, di balik gemerlap industri kosmetik yang memiliki potensi akan keberlanjutannya hingga masa depan, terdapat berbagai permasalahan sosial

yang turut mengintai. Salah satu permasalahan yang masih berkembang hingga saat ini adalah keterlibatan pekerja anak atau *child labour* di dalam aktivitas produksi. Hal ini turut didukung oleh laporan berjudul “*Beauty and a Beast: Take the Child Labour out of your cosmetics*” yang dikeluarkan oleh The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) bersama Terre des Homes yang menerangkan bahwa sedikitnya 20.000 anak terlibat dalam aktivitas *mica supply chain* di dalam industri pertambangan mika ilegal di India dan 10.000 pekerja anak di pertambangan mika Madagaskar pada 2016 (Bureau of International Labor Affairs, 2021). Termasuk ke dalam jenis mineral, mika atau *micare* menjadi salah satu bahan penting dan utama yang dibutuhkan untuk produk kosmetik seperti alas bedak (*foundation*), perona pipi (*blush on*), *lipstick*, hingga *highlighter*.

Salah satu negara penghasil mika dengan kasus pekerja anak terbesar di dunia adalah India. Dengan total jumlah produksi 15.000 ton mika setiap tahunnya, India memiliki apa yang disebut sebagai ***The Mica Belt***, yakni lingkaran daerah-daerah utama yang menghasilkan mika dengan jumlah besar. Dalam praktiknya, *The Mica Belt* telah berhasil menjadi rumah bagi 75 persen sumber mika India dan 25 persen dari total produksi mika dunia (Kate et al., 2016). Kawasan *The Mica Belt* yang melingkupi distrik Nawada, Jamui, Kodarma, dan Gridih dapat diamati pada **Gambar 1.1**. Meskipun dianugerahi dengan sumber kekayaan alam mika yang melimpah, masyarakat Jharkhand tetap menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi hingga mencapai angka 42.16 persen, sementara Bihar menjadi kota termiskin nomor satu di India dengan tingkat kemiskinan mencapai 51.91 persen pada 2021 (UNDP, 2021).

Gambar 1.1 Peta Negara Bagian Jharkhand dan Bihar (Kotak Merah Menandakan Lokasi *The Mica Belt*)

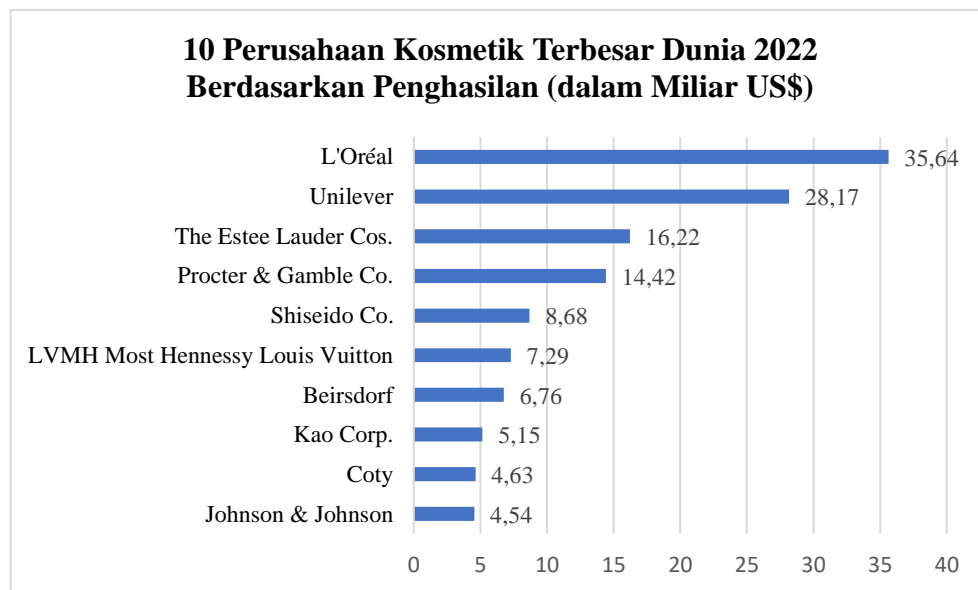


Sumber: (Maps of India, 2022)

Nation Commission for the Protection of Child Rights (NCPCR) menyebutkan bahwa kemiskinan dan tekanan dalam perekonomian inilah yang mendorong anak-anak di Jharkhand maupun Bihar mulai bekerja di sektor pertambangan mika pada usia 5 tahun (Thomson Reuters Foundation, 2016). Kasus pekerja anak pada pertambangan mika di Kawasan Jharkhand dan Bihar yang melibatkan L'Oréal mulai mendapatkan perhatian masyarakat internasional sejak tahun 2005. Melalui investigasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bachpan Bachao Andolan (BBA), ditemukan adanya 5000 anak-anak yang bekerja pada

sektor pertambangan mika ilegal dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 30.000 pekerja anak pada tahun 2022 (Terre des Homes, 2022).

Grafik 1.1 Daftar 10 Perusahaan Kosmetik Terbesar Dunia



Sumber: (Statista, 2022)

Hasil mika yang diperoleh dari pertambangan Jharkhand dan Bihar dipasok secara luas ke sejumlah perusahaan global, termasuk raksasa kosmetik internasional asal Prancis, L'Oréal. Pada **Grafik 1.1**, Statista menjabarkan bahwa pada tahun 2022 L'Oréal masih menduduki posisi sebagai perusahaan kosmetik dan *self care products* nomor satu dunia dengan penghasilan fantastis hingga mencapai US\$ 35.64 miliar (529 triliun rupiah) yang kemudian disusul oleh perusahaan lain seperti Unilever dan The Estee Lauder Cos. sebagai peringkat ketiga dunia (Statista, 2022). L'Oréal membagi segmen bisnisnya ke dalam tiga produk unggulan, seperti: Produk perawatan kulit sebesar 30 persen, produk tata rias sejumlah 22 persen, serta produk perawatan rambut yang memiliki porsi 20 persen. Dari keseluruhan produk yang

dimiliki, sebanyak 948 jenis produk yang dihasilkannya membutuhkan bahan mika (Environmental Working Group, 2016).

L'Oréal bekerjasama dengan perusahaan kimia asal Jerman dan Cina, Merck dan Kuncai dalam mendapatkan pasokan mika untuk memenuhi kebutuhan produknya. Sebagai produsen mika terbesar dalam kancah global, diketahui bahwa pasokan mika yang dikirimkan oleh Ramdu Modi dan Paschisia and Company kepada Merck dan Kuncai mengindikasikan keterlibatan pekerja anak di dalamnya (Dan Watch, 2014). Senada dengan laporan yang diterbitkan oleh Dan Watch, investigasi lapangan yang diterbitkan oleh Java Discover pada 26 Mei 2022 turut menyatakan bahwa Merck dan Kuncai tidak benar-benar memastikan kondisi nyata serta tidak melakukan audit ketat terhadap pertambangan mika dalam pasokan mika yang didapatkannya (Java Discover, 2022). Jika merujuk pada laporan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan baku mineral mika yang digunakan dalam produk L'Oréal turut melibatkan pekerja anak India dalam kegiatan *supply chain* bisnisnya.

L'Oréal menyadari kasus pekerja anak dalam rantai pasokannya sejak 2009. Akan tetapi, jika merujuk pada laporan CORE (Corporate Responsibility) Coallision pada 2017, perusahaan-perusahaan besar termasuk L'Oréal tidak melaporkan adanya risiko pelanggaran terhadap pekerja anak di dalam rantai pasokan bisnis yang dijalankannya. Termasuk dalam hal bagaimana L'Oréal memperoleh mika untuk produk kecantikannya yang dimilikinya (Reuters, 2017). Alih-alih memutus rantai pasokan dan hubungan kerjasamanya dengan Merck maupun Kuncai, pada tahun 2017 L'Oréal justru semakin melanggengkan hegemoninya di

India dengan melanjutkan komitmennya untuk tetap menjaga rantai pasokan mika dari India dengan dalih bahwa jika L'Oréal memutus rantai pasokan dari India, maka kondisi perekonomian masyarakat Jharkhand maupun Bihar akan semakin terpuruk mengingat pertambangan mika menjadi sektor utama bagi masyarakatnya (L'Oréal, 2022).

Sebagai upaya alternatif, pada tahun 2017 L'Oréal bersama 65 perusahaan pemakai mika lainnya berupaya untuk menangani kasus pekerja anak dan permasalahan sosial lain yang dihadapi oleh para penambang mika di India dengan membentuk Responsible Mica Initiative (RMI). Dalam perkembangannya, keberadaan RMI nyatanya tidak menunjukkan tren positif yang cukup signifikan dalam menangani kasus pekerja anak di pertambangan mika India. Jumlah pekerja anak justru mengalami peningkatan pada kurun waktu 2016 dengan total pekerja anak 20.000 menjadi 22.000 di tahun 2021 hingga puncaknya menyentuh angka 30.000 pekerja anak pada tahun 2022 (Terre des Homes, 2022).

Terdapat sejumlah penelitian yang telah membahas keterlibatan MNCs termasuk L'Oréal dalam kasus pekerja anak di pertambangan mika India. Salah satu penelitian tersebut berjudul "*International Norm and Transnational Corporation: The Contribution of L'Oréal to Eradicate Child Labor in Mica Mining in India*" yang ditulis oleh Zain Maulana dan Ika Hidayani Harahap. Dalam tulisannya, Maulana dan Ika berupaya untuk membuktikan bahwa L'Oréal sebagai perusahaan multinasional pada praktiknya mampu bertindak secara etis dengan mematuhi norma internasional. Hal ini mematahkan klaim yang mengatakan bahwa perusahaan pada hakikatnya hanya bergerak untuk mengakumulasi keuntungan

tanpa mempertimbangkan dampak negatif dari aktivitas bisnisnya. Melalui pendekatan konstruktivisme, penelitian Maulana dan Ika berpihak kepada L'Oréal sebagai perusahaan yang etis dan telah berhasil menangani kasus pekerja anak yang terjadi di India (Maulana & Harahap, 2021).

Penelitian kedua yang turut memiliki sumbangsih besar bagi penelitian ini adalah buah karya dari Leahanna Sine yang berjudul "*L'Oréal's Dilemma: Aligning Beauty Trends With Ethical Goals*". Dalam karyanya, Sine memaparkan kedudukan L'Oréal di tengah ambang kebingungan di dalam menghadapi kasus pekerja anak dalam aktivitas bisnisnya. Dimulai dengan pemaparan tingkat keparahan kasus pekerja anak di pertambangan mika India, Sine kemudian membahas keterlibatan L'Oréal sebagai salah satu inisiator dalam terbentuknya Responsible Mica Initiative (RMI) yang digadang-gadang akan menjadi agenda besar perusahaan-perusahaan multinasional pemakai mika dalam mengentaskan keterlibatan pekerja anak. Dalam kesimpulannya, Sine mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan L'Oréal dengan terlibat dalam RMI, mengurangi pasokan mika dari India, serta mengganti sebagian bahan mika alami dengan bahan sintetis belumlah cukup berhasil dalam menumpaskan serta mengurangi angka pekerja anak. Sine meyakini bahwa L'Oréal masih harus tetap berjuang untuk menemukan jalan keluar bagi kasus pekerja anak agar tidak membahayakan bisnisnya (Sine, 2022).

Terakhir, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh John Chelliah (2017) yang berjudul "*Child Labor in the Supply Chain*". Dalam penelitiannya John Chelliah mengungkapkan bahwa perusahaan kosmetik termasuk L'Oréal dan Estée Lauder serta perusahaan pemakai mika lain seperti BMW maupun Volkswagen

dihadapkan pada pilihan untuk melakukan pembersihan nama perusahaan atas kasus pekerja anak untuk mempertahankan citra perusahaan melalui kegiatan-kegiatan sosial perusahaan. John tidak mengungkapkan hubungan secara spesifik terkait bagaimana kasus pekerja anak yang melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional dapat terjadi.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung berpihak pada kegigihan L'Oréal sebagai raksasa ekonomi dalam menangani kasus pekerja anak India, penelitian ini lebih meletakkan keberpihakan kepada kaum *subaltern* dalam hal ini adalah pekerja anak yang ditemukan dalam pertambangan mineral mika di negara bagian timur India, yakni Jharkhand dan Bihar. Dengan meminjam gagasan Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*) khususnya yang dirumuskan oleh Andre Gunder Frank, penulis berupaya untuk menjawab penyebab terjadinya kasus pekerja anak di India serta mengungkap alasan di balik sulitnya menghentikan kasus pekerja anak pertambangan mika India yang ditemukan sejak 2005 hingga 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan dengan latar belakang yang telah disebutkan, penelitian ini mengangkat pertanyaan “Mengapa kasus pekerja anak (*child labor*) yang melibatkan L'Oréal dalam industri pertambangan mika India dapat terjadi dan tetap berlanjut dari tahun 2005 hingga 2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai penyebab terjadinya kasus pekerja anak yang melibatkan perusahaan kosmetik L'Oréal serta menelaah mengapa kasus pekerja anak tersebut masih saja terjadi dari tahun 2005 hingga tahun 2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih ilmu akademik hubungan internasional khususnya terhadap studi analisis ekonomi politik internasional melalui konsep pemikiran Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*) yang digagas oleh Andre Gunder Frank. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu serta pandangan baru terkait hubungan MNCs sebagai kaki tangan negara maju atau metropolis dengan peristiwa terjadinya pekerja anak di negara berkembang. Secara praktis, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memperkaya pemahaman dan wawasan bagi para peneliti hubungan internasional, mahasiswa, dosen, hingga masyarakat umum bahwa di dalam struktur internasional terdapat aktor selain negara yang turut memiliki peran serta dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik di suatu negara.

1.5 Kerangka Teoritis

Neo-Marxisme merupakan salah satu teori yang muncul sebagai perkembangan dari paham Marxisme yang mana sebelumnya dicetuskan oleh Karl Marx. Pendekatan Neo-marxisme mulai dikenal dan mendapatkan perhatian sejak

tahun 1970-an, didorong oleh peristiwa keinginan *the south* untuk mewujudkan perubahan untuk memperbaiki kedudukan dan statusnya dalam sistem internasional. Para pemikir Neo-marxisme berupaya untuk mengembalikan kembali prinsip-prinsip dasar Marxisme yang cenderung mulai disalahartikan oleh generasi baru pasca kehadiran Karl Marx. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Neo-Marxisme tidak dapat sepenuhnya merdeka dari gagasan-gagasan Marxisme dalam menyusun teori serta melontarkan kritik terhadap perkembangan sistem internasional yang ada (Hobden & Jones, 2019).

Meskipun demikian, terdapat perbedaan nyata yang terletak pada objek kajian antar keduanya. Marxisme lebih menyoroti keberadaan kelas dalam masyarakat, sementara Neo-Marxisme lebih terfokus terhadap pembagian sistem internasional yang terbagi dalam kelas-kelas tertentu seperti negara inti (*core*) dan negara pinggiran (*periphery*). Lebih lanjut, Neo-marxisme turut mengungkapkan bahwa di dalam dunia ini terdapat apa yang disebut sebagai teori ketergantungan atau *Dependency Theory*. Keberadaan teori ini ditujukan untuk mengkritisi kondisi ketergantungan yang dialami oleh negara-negara pinggiran (*periphery*) kepada negara-negara inti (*core*) yang diyakini sebagai pemilik modal dan teknologi. Oleh penganut teori ketergantungan, negara *core* berperan sebagai kaum *borjuis* yang didominasi oleh mereka yang berasal dari kalangan *the haute*, *the petit*, dan kaum profesi. Sementara negara *periphery* bertindak sebagai kaum *proletary* yang identik dengan individu atau kelompok yang menjual jasa untuk bekerja dalam industri yang diciptakan dan dimiliki oleh kaum borjuis (Jackson & Sorensen, 2013).

Beberapa tokoh penggagas teori ketergantungan yang terkenal adalah Paul Baran, Theotonio Dos Santos, dan Andre Gunder Frank. Dalam rangka menjawab pertanyaan yang hadir dalam penelitian ini, penulis akan terfokus pada dasar pemikiran Andre Gunder Frank terkait sikapnya dalam menanggapi peristiwa ketergantungan yang melibatkan negara berkembang sebagai kaum yang paling banyak menerima kerugian. Sebagai salah satu penganut Neo-marxisme, Frank mendefinisikan ketergantungan sebagai suatu hubungan yang berkesinambungan dalam kancah global yang diwarnai oleh adanya eksploitasi yang dilakukan oleh negara kuat atas negara yang lemah dalam hal ekonomi. Secara lebih khusus, Frank kemudian menciptakan pembagian hubungan antar negara dalam sistem internasional sebagai apa yang ia sebut dengan negara metropolis dan negara satelit. Negara-negara metropolis diasosiasikan Frank kepada negara maju yang ditandai dengan tingginya angka pendapatan negara sebagai akibat dari kemajuan ekonomi yang didominasi oleh sektor industri dan teknologi, memiliki pemerintahan yang kuat dan demokratis, serta angka kemiskinan yang rendah. Berseberangan dengan pihak metropolis, Frank memberikan indikator negara satelit sebagai negara yang memiliki angka kemiskinan tinggi, permasalahan sosial yang beragam, kekayaan sumber daya alam melimpah, hingga identik dengan tugasnya sebagai penyedia bahan mentah (*raw material*) untuk kebutuhan produksi pihak metropolis (Frank, 1991).

Tidak jauh berbeda dengan para teoritis *Dependency* lainnya, Frank memiliki sejumlah argumen. Salah satu argumen yang berhasil menjadikan Frank dikenal sebagai tokoh inti dari *Dependency Theory* adalah asumsinya tentang penyebab dari

keterbelakangan dan kemiskinan abadi yang terjadi di negara satelit. Secara lebih ringkas, gagasan atau asumsi dasar dari Frank tertuang dalam sejumlah poin berikut: **Pertama**, Frank meyakini jika penyebab keterbelakangan di negara satelit disebabkan oleh adanya distribusi sumber daya yang tidak merata dan proses eksploitasi yang dilakukan oleh negara-negara metropolis. Proses eksploitasi maupun persebaran sumber daya yang tidak merata berujung pada penyaluran keuntungan yang akan selalu bermuara kepada metropolis. Sementara satelit yang menjadi pihak tereksplorasi hanya mampu menikmati kemiskinan dan keterbelakangan abadi. **Kedua**, keterbelakangan di negara berkembang bukan diakibatkan oleh ketidakmampuan negara tersebut untuk berkembang, melainkan disebabkan oleh kondisi sistem internasional yang timpang, dimana di dalamnya terdapat korelasi atau hubungan sejarah ekonomi politik pada era kolonialisme Eropa. Pada akhirnya, kolonialisme yang terjadi memiliki implikasi terhadap kemunculan perbedaan status antar negara. Kondisi sistem internasional yang demikian kemudian mendukung negara metropolis yang secara sengaja mengkondisikan negara satelit agar tidak berkembang. Hal ini dilakukan melalui pembagian peran dimana negara satelit selalu diposisikan sebagai penyedia sumber bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja murah. Sedangkan metropolis selamanya akan menjadi pihak dominan dalam sistem internasional dengan menjadi golongan atau kelas pemilik modal (Frank, 1991).

Ketiga, Frank dalam teorinya turut mengungkapkan jika praktik eksploitasi dan ketergantungan tidak semata hanya dapat dilakukan oleh negara metropolis sebagai aktor utama, melainkan juga melibatkan berbagai instrumen yang terlibat

dalam proses globalisasi seperti Multinational Corporations (MNCs) yang sekaligus menjadi bentuk representasi dari negara metropolis, International Organizations, serta bantuan luar negeri maupun investasi yang mampu membuka akses lebih dalam upaya negara metropolis dalam melanggengkan kedudukan mereka di suatu negara khususnya negara satelit untuk memenuhi kepentingan domestik negaranya. Frank turut menambahkan bahwa bukan menjadi hal yang mustahil apabila para kaum metropolis termasuk elit politik dan instrumen yang terlibat di dalamnya melakukan kolaborasi untuk menjaga kondisi sistem internasional agar terbentuk sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan oleh kaum metropolis dengan tujuan untuk mengarahkan dan mempertahankan keuntungan agar senantiasa berpihak kepada pihak metropolis.

Dependency Theory mengalami masa kejayaan pada kurun waktu 1960-an hingga 1980-an. Sementara popularitasnya sempat menurun pada pertengahan 1980-an sebagai akibat dari kebangkitan ekonomi neoklasik dan ketidakmampuannya dalam menjelaskan peristiwa perubahan baru dalam struktur ekonomi politik internasional khususnya terhadap keberhasilan negara-negara Asia dalam melakukan industrialisasi. Berbagai kritik juga dilayangkan untuk gagasan-gagasan *Dependency Theory*. Salah satu kritik hadir dari penganut *World System Theory* (WST) yang berhasil mengungkap jika negara miskin dan bekas jajahan dapat berkembang di dalam sistem kapitalis dunia modern. Hal ini bertentangan dengan klaim *Dependency Theory* yang menyatakan jika negara miskin akan tetap miskin karena sistem internasional dengan sengaja mempertahankan kondisi tersebut (Revise Sociology, 2017). Kritik lain dihadirkan oleh Noonan dan Murray

dalam “*Andre Gunder Frank (1929 to 2005)*”. Keduanya menyebut bahwa *Dependency Theory* terlalu terfokus pada faktor ekonomi dan kurang melirik faktor sosial, budaya, politik, dan lingkungan yang mana sangat mungkin jika faktor-faktor tersebut memiliki kontribusi terhadap keterbelakangan yang terjadi di negara dunia ketiga. Lebih lanjut, Noonan dan Murray turut mengungkapkan bahwa solusi yang dihadirkan Frank dalam mengatasi keterbelakangan dengan cara melepaskan diri dari kapitalisme sangat tidak mungkin untuk dilakukan dalam ekonomi global kontemporer (Noonan, 2019).

Meskipun *Dependency Theory* terkesan menjadi teori yang “Terlalu Klasik” untuk diaplikasikan pada masa kini, fakta keberadaan kasus pembangunan yang tidak merata dan tren kemiskinan yang meningkat pada abad 21 setidaknya telah menjadi pemantik bagi munculnya kembali wacana akademik terkait relevansi *Dependency Theory* untuk menjelaskan ketimpangan yang terjadi pada era *modern* ini. Oleh karena itu, *Dependency Theory* dapat dikatakan tetap menjadi teori yang relevan dalam menjelaskan hubungan ekonomi dan kekuasaan antar aktor dalam ekonomi global yang masih identik dengan unsur eksploitasi dan ketidaksetaraan.

Dari berbagai argumen yang telah disebutkan, dapat disimpulkan jika *Dependency Theory* memuat tiga gagasan utama, yaitu: Adanya eksploitasi yang dilakukan oleh negara metropolis kepada satelit yang berujung pada terciptanya hubungan ketergantungan antar keduanya; terdapat hubungan sejarah ekonomi politik pada era kolonialisme Eropa yang menggiring perkembangan kapitalisme dan perbedaan status antar negara; serta proses eksploitasi maupun pembentukan ketergantungan tidak hanya dapat dilakukan oleh negara, melainkan juga MNCs

sebagai representasi metropolis yang bertugas untuk melanggengkan hegemoni dan ketergantungan (Frank, 1991). Dengan menggunakan tiga premis utama tersebut, penulis akan berupaya untuk menganalisis mengenai penyebab terjadinya kasus pekerja anak pada sektor pertambangan mika India khususnya yang terjadi di negara bagian timur India, yaitu Jharkhand dan Bihar.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Pekerja Anak

Buruh atau pekerja anak didefinisikan sebagai anak-anak yang berada dalam rentan usia 4 hingga 18 tahun yang mana mereka bekerja pada berbagai sektor pekerjaan yang berkelanjutan dan merenggut keseluruhan masa anak-anak sehingga hak dasar anak tidak terpenuhi. Hak dasar yang dimaksud salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan selayaknya anak-anak pada umumnya (Prajnaparamita, 2018). Sementara definisi pekerja anak jika merujuk pada pengertian ILO adalah anak-anak yang bekerja pada segala jenis pekerjaan yang mengganggu kesehatan fisik, mental, moral, hingga intelektual. Secara lebih spesifik, dalam Konvensi ILO No.138 menjelaskan mengenai usia minimum untuk melegalkan anak bekerja.

Pada negara berkembang yang mana masih memiliki kekurangan dalam hal perekonomian maupun fasilitas pendidikan, memperkerjakan anak berusia 5 hingga 11 tahun harus benar-benar

dihapuskan dan dilarang. Kemudian apabila anak telah berusia 12 hingga 14 tahun anak-anak diperkenankan untuk mengerjakan tugas ringan. Sedangkan usia anak minimal 18 tahun diperkenankan untuk bekerja pada sektor pekerjaan yang tidak dikategorikan dalam pekerjaan berbahaya (International Labour Organization, 1999).

Definisi pekerja anak lainnya dijelaskan oleh Vanderberg yang mengartikan pekerja anak sebagai istilah yang mengacu pada anak-anak yang menjalankan pekerjaan yang berpotensi menghalangi pendidikan, merusak kesejahteraan, perkembangan, serta masa depan anak. Vanderberg turut mengaplikasikan dua istilah yang terkait dengan konsep pekerja anak, yaitu: anak yang bekerja dan anak yang aktif secara ekonomi. Kedua istilah ini merujuk pada pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak dengan durasi waktu lebih dari satu jam selama seminggu baik mendapatkan upah atau tidak, sambilan atau permanen, serta *illegal* ataupun legal. Pekerjaan rumah tangga dikatakan Vanderberg tidak masuk ke dalam dua jenis istilah tersebut (Vanderberg, 2009).

1.6.2 Multinational Corporations (MNCs)

Di dalam hubungan internasional, negara tidak menjadi aktor tunggal dalam memainkan peran dalam kehidupan ekonomi, sosial, hingga politik di panggung global. Kehadiran aktor lain seperti perusahaan multinasional (MNCs) berhasil mewarnai kehidupan

masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi dan politik. Robert Gilpin mengartikan MNCs sebagai suatu perusahaan besar yang mengelola dan memiliki unit ekonomi lebih dari satu negara. MNCs dalam perjalannya berusaha untuk mengglobalisasi aktivitas perusahaan dengan tujuan untuk melayani pasar luar negeri maupun memasok pasar di dalam negeri. MNCs disebut bersifat oligopolistik di mana pengelolaan, kepemilikan, aktivitas penjualan hingga produksinya yang melampaui lintas batas negara (Abdelal & Tedlow, 2005).

Untuk mengembangkan bisnis, MNCs melakukan penyebaran kelompok anak perusahaan hingga ke berbagai penjuru negara dengan tetap mempertahankan kantor pusat hanya di satu negara. Hal ini dilakukan dengan latar belakang untuk mengamankan atau menekan biaya produksi dari barang paling bernilai rendah untuk menunjang keperluan pasar dunia. Untuk mencapai tujuan ini, tidak jarang MNCs akan mencari wilayah produksi yang diyakini paling memiliki fasilitas paling efisien. Tidak hanya bermain pada sektor ekonomi, MNCs juga dapat melibatkan diri dalam pembentukan kebijakan yang hendak dikeluarkan negara baik pada level nasional maupun global (Bakry, 2017).

1.6.3 Pertambangan

Pertambangan didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengolahan, penelitian, serta pengusahaan batu bara atau mineral yang meliputi aktivitas eksplorasi, pengangkutan dan penjualan, serta pengolahan dan pemurnian. Jika merujuk pada definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kegiatan menambang diartikan sebagai aktivitas penggalian, yakni mengambil barang tambang dari dalam tanah. Sementara definisi lain disajikan oleh Abrar Saleng yang mengartikan pertambangan sebagai usaha untuk mengambil dan memanfaatkan bahan galian yang berasal dari dalam perut bumi. Jika berkecenderungan pada pengertian-pengertian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pertambangan merupakan industri di mana bahan galian yang juga berupa mineral akan diproses dan dipisahkan dari material yang tidak dibutuhkan. Dalam industri pertambangan mineral, proses pemisahan ini disebut sebagai ekstraksi (Wolfman, 2013).

Pada dasarnya, hakikat dari aktivitas dan pembangunan sektor pertambangan adalah ditujukan dalam rangka penggunaan secara hemat dan optimal untuk menunjang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Selain mineral, dalam industri pertambangan juga menarget beberapa jenis bahan yang akan dimanfaatkan. Bahan-bahan tersebut adalah minyak bumi, batu-

bara, timah, biji besi, biji emas, serta bahan lain seperti tembaga (Nandang, 2013).

1.6.4 Sistem Internasional

Theodore A. Coulombis dan James Hastings Wolfe dalam *“Introduction to International Relations: Power and Justice”* mengungkapkan bahwa sistem internasional merupakan suatu perangkat hubungan internasional yang telah dibentuk sedemikian rupa selayaknya situasi dan kondisi yang terjadi di atas panggung global. Tugas dari sistem internasional diarahkan untuk mewadahi segala praktik interaksi internasional yang melibatkan peran berbagai jenis aktor baik resmi maupun tidak resmi. Lebih lanjut, Coulombis dan Wolfe turut menegaskan bahwa pembentukan sistem internasional didasarkan pada kondisi kekuatan yang dimiliki oleh negara satu atas negara lain. (Coulombis & Wolfe, 1990).

Di dalam arena sistem internasional, juga terjadi sejumlah transaksi, pertukaran arus info, hingga adanya aksi dan reaksi sebagai buah dari adanya interaksi antar negara. Puncaknya, interaksi yang dilakukan oleh negara-negara maupun aktor lain di dunia akan memicu munculnya kerjasama internasional yang diselenggarakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang mana dari hubungan ini diharapkan keuntungan akan mengalir kepada seluruh pihak yang terlibat. Sayangnya, pola hubungan antar negara

yang diatur oleh sistem internasional ini pada praktiknya memunculkan polaritas yang berdampak pada ketergantungan setiap negara terhadap intruksi yang diberikan oleh negara dengan kekuatan atau polar dominan (Coulombis & Wolfe, 1990).

1.7 Argumen Penelitian

Keterbelakangan dan kemiskinan yang terjadi di Jharkhand dan Bihar menjadi tonggak awal bagi kemunculan kasus pekerja anak pada pertambangan mika India. Anak-anak mau tidak mau harus turut serta dalam aktivitas pertambangan sebagai akibat dari tingginya angka permintaan bahan mika dari berbagai pelaku industri global seperti L'Oréal. Kondisi tersebut tidak lain disebabkan oleh adanya sistem internasional yang timpang dan tidak adil yang mana selalu menempatkan masyarakat Jharkhand dan Bihar termasuk para pekerja anak pada kondisi terbelakang atau *satellite* dengan perannya sebagai penyedia bahan baku mentah (*raw material*) dan tenaga kerja murah. Sementara untuk mendapatkan pendapatan, pekerja anak bergantung kepada eksistensi L'Oréal sebagai sosok metropolis yang akan membeli bahan mika dari area pertambangan. Dengan kondisi inilah, kasus pekerja anak dan keterbelakangan di Jharkhand maupun Bihar akan tetap terjadi meskipun kawasan Jharkhand maupun Bihar menjadi salah satu penyumbang sumber daya mineral mika terbesar di dunia.

1.8 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan menekankan pada proses analisis dan lebih mengarah kepada substansi makna dari suatu fenomena. Penelitian kualitatif akan cenderung menggunakan pemahaman subjektif dengan didukung oleh fakta-fakta dan realita yang terjadi di lapangan yang akan bersinggungan dengan masyarakat, perilaku, sejarah, serta gejala-gejala sosial lainnya (Creswell, 1998). Penelitian ini kemudian bersifat eksplanatif yang bertujuan untuk mencari sebab atau faktor kausal (*explaining*) dibalik terjadinya suatu fenomena. Lebih lanjut, penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pola deduktif, yaitu penelitian yang berangkat dari premis umum teori atau konsep untuk kemudian dibuktikan dengan temuan hasil lapangan sehingga penulis dapat menarik kesimpulan.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan tipe penelitian eksplanatif yang ditujukan untuk mencari tahu penyebab atau faktor kausal (*explaining*) dibalik suatu fenomena. Pada dasarnya, penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menerangkan serta menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian. Fokus penelitian dengan tipe eksplanatif berkaitan erat dengan proses analisis hubungan-hubungan antara variabel (Bungin, 2011). Sebagai penelitian yang memiliki tipe eksplanatif, penelitian ini mencoba menjawab mengenai penyebab dari terjadinya kasus

pekerja anak yang melibatkan L'Oréal di pertambangan mika di India dan mengapa kasus tersebut terus berlangsung dari tahun 2005 hingga tahun 2022.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat di mana sebuah penelitian diselenggarakan. Pemilihan situs penelitian menjadi sangat penting mengingat hal ini akan menentukan terkait bagaimana peneliti dapat memperoleh data-data yang relevan serta mengetahui kondisi nyata dari subjek yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian. Terkait penelitian ini, penulis menyelenggarakan penelitian *desk research* dengan tetap mempertimbangkan cakupan subjek penelitian yang bersifat global, hal ini kemudian tidak memungkinkan penulis untuk dapat turun ke lapangan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak akan menjadi masalah yang berarti karena peneliti akan memaksimalkan sumber atau dokumen-dokumen resmi seperti *Annual Report* L'Oréal dan Responsible Mica Initiative (RMI), *website* resmi pemerintah India khususnya Indian Bureau of Mines, hasil penelitian lembaga internasional non-pemerintah seperti Dan Watch dan The Freedom Hub, wawancara investigasi lapangan yang diterbitkan oleh sejumlah media, serta laporan yang disajikan oleh Non-

Governmental Organizations (NGOs) yang menjadi payung bagi hak dan perlindungan anak seperti Terre des Hommes (TDH).

1.8.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini melibatkan dua subjek utama, yaitu para pekerja anak yang berada di pertambangan mika Jharkhand maupun Bihar serta L'Oréal sebagai aktor yang terlibat langsung di dalam terjadinya kasus pekerja anak. Melalui kedua subjek tersebut, penulis berharap akan mendapatkan informasi dan menceritakan tentang apa yang mereka ketahui mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.8.4 Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer merupakan jenis data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian melalui beberapa teknik pengambilan data sebagai sumber informasi yang akan diperoleh. Sementara data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak lain yang tidak menjadi subjek penelitian.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui dokumen resmi

tangan pertama hingga pernyataan narasumber yang dapat ditemukan di media sosial, seperti laman resmi perusahaan L'Oréal, situs resmi International Labour Organization (ILO), Dan Watch, Terre Des Homes, serta *website* resmi Biro Pertambangan Pemerintah India (Indian Bureau of Mines) yang memuat informasi seperti undang-undang, data pertambangan mika, maupun arsip pernyataan kepala pemerintahan yang disertai dengan kop negara. Sedangkan untuk data sekunder adalah sumber informasi tidak langsung yang dapat diperoleh melalui jurnal, artikel, hingga pernyataan-pernyataan yang dikutip dan telah diolah oleh media massa. Pada penelitian ini, penulis merujuk pada investigasi dan wawancara yang dilakukan langsung dan dipublikasi oleh media seperti Java Discover, CNA Insider, dan Vice Asia.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau *desk research*. Secara lebih spesifik, proses pengumpulan data penulis lakukan dengan metode *internet research* yang mana dalam proses pencariannya dilakukan dengan kritis dan tetap memperhitungkan sumber kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan. Begitupun dengan *library research*, dalam mengumpulkan data yang berasal dari buku, artikel, maupun tulisan

yang ada di perpustakaan, penulis tetap memperhatikan kredibilitas sumber yang didapatkan.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Untuk proses analisis data, penulis menggunakan metode analisis data kongruen. Metode analisis data kongruen merupakan metode yang memungkinkan peneliti untuk merumuskan sebuah teori untuk kemudian memberikan gambaran hasil akhir dari kasus atau peristiwa tertentu. Metode kongruen digunakan untuk menemukan kesesuaian antara masalah penelitian dengan pertanyaan penelitian, kesesuaian pertanyaan dengan metode yang digunakan, serta kesesuaian antara metode, data, serta cara pengelolaan data (Morse, J. M., and Richards, 2002). Secara lebih sederhana, metode kongruen digunakan penulis untuk menguji kecocokan teori dengan data yang ada di lapangan (Bennett, 2005).